



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 12
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Ketua Dewan Komisioner OJK
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juni 2019
Waktu : 14.00 WIB s.d 18.55 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI
Ketua Rapat : Ir. H. Achmad Hafisz Tohir
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono
Acara : Penjelasan Laporan Triwulan I Otoritas Jasa Keuangan
Tahun 2019
Hadir : KETUA DEWAN KOMISIONER OJK

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR/F-PAN/WAKIL KETUA):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua,
Om swasti astu,
Namo budaya.

Yang kami hormati saudara Ketua Dewan Komisiner OJK beserta jajarannya,
Bapak Wimboh dan Komisiner yang lain,
Yang kami hormati juga Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Catatan dari Sekretariat Komisi XI DPR RI Anggota bertandatangan 18 orang dari 9 Fraksi dan ijin 1 orang. Sesuai ketentuan Pasal 25,1, maka ijinilah kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisiner OJK. Dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14 WIB)

Saudara Ketua Dewan Komisiner OJK, Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa hadir pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat. Dan semoga nanti apa yang kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Agenda kita pada hari ini adalah penjelasan Laporan Triwulan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019. Berdasarkan laporan OJK Triwulan IV tahun 2018 kinerja perbankan nasional secara umum dalam keadaan yang solid didukung dengan tingkat permodalan dan likuiditas yang memadai serta fungsi intermediasi yang semakin baik dengan pertumbuhan kredit sebesar 11,75% year on year dan tren *non performing loan* yang menurun.

Kinerja industry keuangan non bank atau IKNB juga bergerak positif tercermin dari piutang pembiayaan yang disalurkan meningkat sebesar 5,17%, disertai dengan kualitas pembiayaan yang cukup baik. Sedangkan realisasi anggaran OJK 2018 sampai dengan akhir tahun sebesar 4,715 triliun atau 94,73% dari pagu anggaran yang disepakati, yaitu 4,977 triliun. Rapat Dewan Komisiner memutuskan bahwa sisa anggaran OJK akan digunakan untuk pembayaran kewajiban PPH badan sehingga realisasi anggaran tahun 2018 menjadi 100%.

Dalam kesempatan rapat ini kami dari Komisi XI DPR RI meminta kepada Ketua Dewan Komisiner OJK untuk menjelaskan laporan Triwulan OJK hingga Triwulan

keempat, termasuk program yang telah dilaksanakan serta output dan outcome yang didapatkan dari kegiatan dan program yang dilaksanakan tersebut.

Selain itu juga kami meminta kepada OJK untuk sedikit melakukan evaluasi dan pandangan terhadap situasi terkini ekonomi kita terhadap penekanan world bank yang mengatakan bahwa 2019 ini akan terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi dunia. Terkait dengan hal tersebut kami minta pandangan dari OJK.

Demikian yang kami sampaikan, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ketua Dewan Komisioner OJK untuk menyampaikan pokok-pokok paparannya. Waktu dan tempat kami persilakan.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBO):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua,
Om swasti astu,
Namo budaye.

Yang kami hormati Pimpinan Rapat dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua Bapak Achmad Hafisz Tohir dan Bapak M. Prakosa, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat, Dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama melakukan Rapat Kerja antara OJK dan Komisi XI DPR RI.

Atas nama Komisioner Otoritas Jasa Keuangan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat untuk membahas laporan triwulan OJK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Jasa Keuangan.

Mengawali pembahasan ini sebelumnya kami menyampaikan, sebelum kami menyampaikan capaian kinerja OJK dan laporan realisasi Anggota OJK selama triwulan I tahun 2019. Ijinkanlah kami menyampaikan terlebih dahulu perkembangan perekonomian ekonomi dan industry jasa keuangan nasional.

Dapat kami sampaikan pada hari ini kami ditemani Ibu Waka, Bapak Riswinandi, Bapak Husein, Muhammad Hidayat, Bapak Tirta dan kebetulan Bapak Heru dalam perjalanan pulang dari dinas Tokyo melakukan pemeriksaan. Namun demikian, ini kayaknya dalam perjalanannya ada delay sehingga ini kami mohon maaf, sehingga Bapak Heru tidak bisa hadir pada siang hari ini.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang kami hormati.

Kami melihat perekonomian global sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan masih sangat dinamis. Memang secara umum prediksinya lebih rendah dari sebelumnya. Dan ini disebabkan adanya tensi perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yang kita juga belum tahu kira-kira ujungnya bagaimana. Dan ditambah juga akhir-akhir ini ada tensi antara Amerika dan Iran bahkan Amerika mengancam akan mengenakan sanksi embargo. Juga ketidakpastian tindaklanjut Brexit, bahkan Perdana Menteri Inggris sudah mundur. Dan juga ini menjadi penyelesaian Brexit menjadi kurang jelas. Dan inilah yang menyebabkan berbagai pertimbangan tadi beberapa negara bahkan IMF merevisi global ekonomi growth-nya di tahun 2019 dari 3,5% menjadi 3,3%. Dan World Bank juga merevisi dari 2,9% menjadi 2,6%. OECD juga merevisi dari 3,5 menjadi 3,2. Ini adalah bahwa dunia akan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah.

Dalam merespon proyeksi pertumbuhan tersebut beberapa negara termasuk Amerika melakukan penyesuaian arah kebijakan moneter menuju kebijakan yang lebih akomodatif, agar tensi dampak negatifnya bisa diminimalisir. Diantaranya terbukti bahwa The Fed siap melakukan penyesuaian tingkat suku bunga untuk menjaga agar momentum pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pembangunan tetap terjaga. Jadi sudah trennya The Fed itu juga sudah akan menurunkan suku bunga, *timing*-nya kita belum tahu tapi kelihatannya tidak terlalu lama. Bahkan Bank Sentral Rusia menurunkan tingkat bunga acuan 0,25% menjadi 7,5% dan juga Reset Bank Of India menurunkan tingkat suku bunga 25 basis point juga ke level 5,5%. Diantaranya kalau khusus India dipicu keluhan investasi dan konsumsi rumah tangga.

Bank Central Australia menurunkan tingkat suku bunga acuan juga 25 basis point ke level 1,25%. Ini adalah khusus Australia ini pertama kali dalam 3 tahun terakhir. Dan bahkan otoritas menyarankan akan menurunkan kembali tingkat acuan ke depan akibat *global trade tension* dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Beberapa negara lain seperti Bank of Central of Philipina, New Zeland, Reset Bank dan Bank Negara Malaysia juga menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Bank Indonesia dalam rapat terakhir menetapkan tingkat bunga acuan reverse repo tetap di level 6%, namun mengumumkan giro wajib minimum 50 basis point. Sehingga itu adalah fakta bahwa *confirm*, bahwa semua negara mencoba untuk memberikan ruang pertumbuhan yang lebih luas kepada ekonomi domestiknya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global tersebut patut disyukuri bahwa hingga saat ini fundamental ekonomi Indonesia masih cukup solid. Dapat kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Q1 tercatat sebesar 5,07% meningkat dibandingkan dengan Q1 tahun 2018 sebesar 5,06. Pada akhir 2018 dapat kami sampaikan ekonomi tumbuh 5,17%.

Dapat kami sampaikan juga bahwa inflasi terjaga dalam rentang target, yaitu 3,5%+-1 dimana pada bulan Mei tercatat sebesar 3,32% secara YoY. Cadangan devisa pada akhir Mei 2019 ini tercatat 120,3 billion US Dolar dimana April kemarin 124,3 billion US Dolar cukup untuk membiayai 6,9 bulan impor. Dan juga 6,7 bulan impor dalam pembayaran hutang luar negeri Pemerintah.

Namun demikian, keseimbangan eksternal masih menjadi tantangan mengingat ketergantungan ekspor kita terhadap komoditas dan ketergantungan impor kita

terhadap migas. Sehingga *current account deficit* Q1 memang menyempit ke 2,6% terhadap PDB atau dalam US Dolar sebesar 7 miliar. Di mana kalau kita bandingkan Q4 tahun sebelumnya dimana tahun 2018 itu sebesar 3,6% dari PDB atau dalam US Dolar 9,2 miliar.

Namun demikian, Neraca pembayaran yang surplus pada Q1 ini sebesar US Dolar 2,4 miliar dan neraca perdagangan di Bulan Mei lalu masih tercatat defisit sebesar 2,1 miliar.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang kami muliakan.

Dapat kami laporkan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan sepanjang tahun 2019 tercatat dengan terjaga dengan baik. Pasar keuangan domestik kinerjanya terpantau cukup baik, indeks harga saham gabungan pada 26 Juni 2019 ditutup pada level 6.310,49 atau membukukan *positive return* sebesar 1,87% sepanjang 2019 secara year to date.

Nilai tukar Rupiah ditutup pada level 14.178 per US Dolar atau menguat sebesar 2,68% year to date. Sementara itu SBN tenor 10 tahun berada di level 7,52%. Selama tahun 2019 dapat kami sampaikan sampai dengan tanggal 26 Juni investor asing tercatat melakukan pembelian bersih di pasar saham sebesar 59,72 triliun. Sementara pembelian bersih di pasar SBN sampai 25 Juni sebesar 90,99 triliun.

Di sisi permodalan industry jasa keuangan per akhir Mei cukup kuat perbankan pada level 22,54%, gearing ratio perusahaan pembiayaan 2,85 kali dan RBC asuransi umum 313% dan RBC Asuransi Jiwa sebesar 641%.

Sementara itu kalau kami sampaikan mengenai intermediasi yang kita amati sampai bulan Mei adalah sebagai berikut. Pertumbuhan kredit masih double digit 11,05% secara YoY meskipun DPK tumbuh moderat sebesar 6,27% secara YoY. Pertumbuhan kredit perbankan tersebut ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh 15,70% secara YoY, ini luar biasa sudah kepada yang produktif. Sementara kredit konsumsi dan modal kerja masing-masing 8,35% dimana konsumsi ini biasanya mendominasi tetapi saat ini konsumsinya lebih rendah dari pertumbuhan kredit secara *over all*, yaitu 8,35% untuk konsumsi. Dan untuk kredit modal kerja sebesar 10,22%.

NIM perbankan cenderung menurun sebesar tercatat menjadi 4,9%. Penurunan tersebut diikuti dengan peningkatan ROA sebesar 2,41% yang menunjukkan bahwa mampu untuk penurunan NIM dengan sumber lain *fee base income*. *Fee base income* tumbuh 52,1% sedangkan berdasarkan per Mei posisi *fee base income* mencapai 32,1% untuk tahun 2018 sebesar 25%.

Tingkat bunga kredit juga cenderung menurun meskipun tingkat suku bunga deposito meningkat. Jadi perbankan masih bisa menahan untuk peningkatan suku bunga kredit. Di pasar modal jumlah penawaran umum sampai dengan 31 Mei tercatat sebesar 54,76 triliun yang berasal dari 53 penawaran umum. Kalau dibandingkan dengan 2018 penawaran umum sebesar 166 triliun atau 168 perusahaan. Sementara itu di industry keuangan non bank pertumbuhan piutang akhir Mei tercatat moderat sebesar 5,3%. Sedangkan pada akhir-akhir ini kami juga men-track mengenai pertumbuhan penyaluran kredit melalui fintech di mana per Mei sebesar 8,3 triliun, di

mana tumbuh 65% secara year to date yang dilakukan oleh 113 perusahaan yang terdaftar.

Dari aspek resiko dapat kami sampaikan bahwa NPL terkendali di mana gross NPL sebesar 2,61% sementara NPL perusahaan pembiayaan tercatat 2,73%. Resiko likuiditas perbankan masih terkelola dengan baik dengan ratio alat likuid noncore deposit sebesar 88,33% per April tahun ini. Dan loan to deposit ratio sudah mulai menurun menjadi 93,58%. Adapun indikator lainnya diantaranya adalah Liquidity Coverage Ratio atau LCR sebesar 199,92% dan akses reset sebesar 593 triliun. Jadi dapat kami sampaikan bahwa likuiditas masih terjaga dengan baik.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat.

Kami menyadari bahwa tantangan ekonomi dan sektor jasa keuangan Indonesia kedepan tidaklah mudah untuk agar menjaga mendukung pertumbuhan growth dan stabilitas tetap terjaga. Dan kita telah menyadari bahwa dampak dari perlambatan ekonomi global ini akan ditransmisikan kepada perekonomian dalam negeri. Lantas, bagaimana kita harus melakukan mitigasi ini diantaranya kita ada beberapa kebijakan, baik di OJK maupun seluruh kementerian bahwa kita akan mendorong bagaimana kita memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada industry yang berorientasi ekspor dan industry yang juga memproduksi substitusi impor dan juga kita melakukan hilirisasi untuk industry-industry yang menggunakan *natural resources*, diantaranya refinery dan smelter dan sebagainya.

Di samping itu beberapa rapat kabinet terakhir ruang untuk itu diantaranya bukan hanya kebijakan *direction* dari OJK tapi juga perpajakan akan menjadi prioritas dan juga mengatasi keterbatasan ketersediaan SDM dan juga bagaimana kita menggunakan teknologi yang lebih dini, namun tidak terlalu mengganggu penggunaan *labor* di Indonesia. Untuk memastikan itu kami siap untuk mengarahkan orientasi pembiayaan industry jasa keuangan ini kepada sektor-sektor tadi yang menjadi prioritas.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya terkait dengan capaian kinerja OJK tahun 2019 dapat kami sampaikan bahwa kami juga akan melanjutkan 5 sasaran strategis yang telah kami tetapkan pada awal tahun. Secara rinci dapat kami sampaikan kelima sasaran strategis dan capaian pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

Yang pertama, sasaran strategis menyediakan alternative pembiayaan sektor strategis Pemerintah. Pembiayaan sektor prioritas yang dilakukan melalui beberapa alternatif antara lain penawaran umum, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), kontrak investasi kolektif, IPASP, kontrak pengelolaan dana, KIK-DIRE dan KIK Dinfra.

Capaian dana kelolaan untuk masing-masing pembiayaan adalah sebagai berikut. Untuk emisi penawaran umum terutama dana kelolaan adalah 54,76 triliun dan ini dilakukan oleh 53 penawaran umum, 12 diantaranya adalah IPO, yang kedua RDPT sebesar 23,96 triliun ada 64 perusahaan RDPT. KIK EBA ada 6,93 triliun ada 7 KIK ya

dan EBA SP ada 3,15 triliun ada 5 EBA SP, KPD berjumlah 209,23 triliun yang dilakukan oleh 512 KPD. KIK DIRE dan KK Dinfra masih kecil hanya 0,92 triliun dan 0,64 triliun tapi ada informasi ada satu perusahaan yang cukup besar jumlahnya 13 triliun segera. Dan ini yang sudah dilakukan ada 7 KK DIRE dan 4 KIK Dinfra.

Penyediaan alternative pembiayaan sektor strategis Pemerintah juga dilakukan melalui rencana penerbitan obligasi daerah. Setelah menerbitkan 3 POJK terkait obligasi daerah kami terus melakukan penjajakan dan pendampingan ke daerah-daerah untuk memiliki potensi dan tentunya merencanakan untuk menerbitkan obligasi daerah. Hingga April 2019 telah dilakukan sosialisasi high lable meeting penerbitan obligasi daerah ke 4 Pemda, yaitu Bali, Sumatera Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah saat ini telah disusun Raperda terkait dengan pinjaman daerah namun menunggu persetujuan DPRD. Dengan obligasi daerah ini kami harapkan di daerah-daerah nanti infrastruktur yang tidak secara komersil bisa dibiayai oleh private bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau BUMD.

Kami juga melakukan sosialisasi penerbitan daerah ke beberapa daerah yang tentunya kita harapkan akan segera mengikuti daerah-daerah lain untuk mencoba menginisiasi dikeluarkannya Opda, yaitu diantaranya Banten, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Sulsel, Kalsel, dan Jawa Barat.

Sasaran strategis kedua, yaitu mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan tersebut dilakukan antara lain dengan kontribusi lembaga jasa keuangan dalam sektor prioritas. Untuk itu, antara lain OJK telah melakukan penerbitan dua ketentuan terkait kebijakan mendorong industry pariwisata, yaitu OPJK tentang batas maksimum pemberian kredit atau batas maksimum penyaluran dana untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan peningkatan devisa.

POJK tentang perubahan kegiatan usaha dan jaringan kantor modal inti. Dan juga kita telah menandatangani MoU dengan berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor produktif khususnya di sektor industry kreatif orientasi ekspor.

Dapat kami sampaikan berikutnya sasaran strategis ketiga, yaitu menyediakan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat di daerah terpencil. Untuk peningkatan akses keuangan bagi UMKM beberapa hal telah dilakukan OJK antara lain yang pertama mendorong penyaluran KUR hingga akhir Mei kemarin KUR yang disalurkan sebesar 65,5 triliun atau 46,8% dari target. Yang kedua, mendorong asuransi mikro hingga akhir Q1 tahun 2019 jumlah peserta asuransi mikro mencapai lebih dari 22 juta orang. Yang ketiga, mendorong pembentukan Bank Wakaf Mikro hingga akhir Juli 2019. Mohon maaf bukan Juli ini mestinya akhir Juni. Kami memperkirakan sudah 55 Bank Wakaf Mikro, 6 diantaranya dalam proses pendirian.

Per Maret 2019 jumlah penyediaan kredit kepada Bank Wakaf Mikro pada nasabah sudah 18,54 miliar lebih dari 15 ribu nasabah. Yang keempat, melakukan sosialisasi program optimalisasi Bungdes di 13 provinsi dan memfasilitasi pembentukan Bungdes center, 2 BUMR center dan 1 BUNG kampung center di Jawa. Ini adalah bekerja sama dengan Pemda, Pemerintah Desa dalam rangka bagaimana sinergi antara Bank Wakaf Mikro dengan Bungdes.

Yang kelima, mendorong pelaksanaan Laku Pandai saat ini telah lebih dari 1 juta Laku Pandai dengan 23,3 juta nasabah dan jumlah standing tabungan senilai 2,51 triliun. Yang keenam, mendukung pelaksanaan bantuan pangan non tunai yang bersama-sama Pemerintah. Yang ketujuh, optimalisasi peran percepatan akses keuangan daerah. Daerah hingga saat ini sudah 87 TPAKD yang tersebar di 32 provinsi dan 55 kabupaten. Dan juga mendorong implementasi program jaring hingga Mei 2019 senilai penyaluran kredit sebesar 30,78 triliun.

Selanjutnya kami sampaikan sasaran strategis keempat adalah mempersiapkan industry jasa keuangan mengadopsi revolusi industry 4.0 yang telah dilakukan kita mengoptimalkan fintech pada sampai akhir Maret sudah 106 penyelenggara p to p lending yang terdaftar dengan total pembiayaan 33,2 triliun kepada 6,96 juta debitur. Sehingga 18 Juni 2018 tercatat 113 p t p lending terdaftar. Adapun total akumulasi pinjaman hingga April sebesar 37 triliun dan ini naik cukup besar, yaitu 63,3% year to date kepada 7,77 juta debitur atau naik 78% year to date.

Kita juga mempunyai fintech center yang memfasilitasi orang-orang yang ingin mendirikan start up dan juga kita dalam edukasi masyarakat kita mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi yang telah menutup 947 entitas penyelenggara p to p lending yang ilegal.

Sasaran terakhir yaitu mereformasi bisnis proses industry dan juga bagaimana kita proses bisnis di OJK. Kita dalam pengawasan bank telah menerapkan yang kita sebut off box, off box ini adalah sistem pengawasan yang tanpa harus hadir di bank kita sudah bisa akses informasi-informasi yang disediakan melalui repository oleh bank, sehingga kita mengurangi waktu untuk verifikasi data dilapangan.

Kita sudah ada pilot dan kita sudah mulai untuk memperluas ke beberapa bank. Di samping itu kita juga proses bisnis internal, mengoptimalkan perijinan agar prosesnya lebih cepat dengan menggunakan teknologi. Dan kita juga meningkatkan berbagai pelayanan di antaranya sehingga kita bisa memberikan service yang lebih baik pada nasabah kita.

Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang berbahagia.

Kita juga kita harus senantiasa meningkatkan penerapan standart prudensial dengan mengacu kepada internasional *international best practices*, sehingga kita selalu melalui program-program peningkatan baik governance dan juga berbagai program-program lainnya.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kami juga telah mengeluarkan 16 peraturan OJK dan 7 surat edaran OJK yang sebagian besar adalah berada di sektor pasar modal dengan rincian 4 POJK dan 1 sektor perbankan, 9 POJK dan 2 sektor pasar modal dan 3 POJK dan 4 sektor IKMB. Itu adalah senantiasa untuk meningkatkan *compliance* kita dan prudensial industry jasa keuangan.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kami juga melakukan upaya agar literasi keuangan kita tercapai dengan baik pada tahun ini 75%. Kami mendorong berbagai program edukasi kepada masyarakat melalui program kebudayaan, wayang kulit dan sebagainya. Dan kita juga diantaranya mendorong penyaluran KUR dengan bekerja sama dengan berbagai instansi maupun dengan berbagai sektor jasa keuangan. Tadi sudah kami sebutkan ada bekerja sama dengan Bungdes dan kita memperluas akses keuangan melalui TPAKD.

Dan di samping itu kami juga mencanangkan ada nanti ada simpanan pelajar atau Simpel yang akan kami rencanakan di tahun ini dan kita juga mempopulerkan namanya *one student one account*. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, kami terus mengupayakan perbasasi *market conduct* pengawasan kita dan juga terutama fintech ini kita sangat konsen bagaimana prakteknya itu konsumen terlindungi dengan baik ya.

Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia.

Berbagai program yang kami lakukan tadi ini tentunya tidak akan baik apabila kita tidak bersinergi dengan instansi-instansi lain. Sehingga kita juga diantaranya mengoptimalkan peran asosiasi fintech ini untuk bersama-sama kita untuk melakukan *enforcement* kepada Anggotanya dan juga asosiasi fintech ini telah mengeluarkan yang disebut dengan *quote of conduct* bagi Anggota fintech, sehingga nanti *quote of conduct* ini harus dipatuhi diantaranya termasuk penagihannya, termasuk transparansinya. Bahkan sudah sepakat akan mengumpulkan seperti silk tetapi khusus untuk fintech. Dan ini akan menjadi basis para peserta fintech ini untuk akses ke informasi tersebut.

Selanjutnya dapat kami sampaikan mengenai kinerja keuangan OJK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, Dewan Komisioner OJK menyusun dan menetapkan RKA OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrative, pengadaan aset dan pendukung lainnya dengan terlebih dahulu meminta persetujuan DPR RI.

Dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK disebutkan bahwa pungutan yang diterima oleh OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Komisi XI DPR RI telah menyetujui anggaran OJK tahun 2019 sebesar Rp5.679,70 miliar yang bersumber dari pungutan tahun 2018. Namun demikian, realisasi penerimaan pungutan OJK tahun 2018 hanya mencapai 97,36% dari target atau sebesar Rp5.529,7 miliar, sehingga terdapat kekurangan dari target sebesar 150 miliar.

Kekurangan tersebut berdampak pada anggaran OJK tahun 2019 sehingga kami pun telah melakukan penyesuaian anggaran OJK tahun 2019 menjadi Rp5.529,7 miliar dengan menyesuaikan khususnya pagu pengadaan aset. Mengingat siklus anggaran OJK tidak mengenal visi anggaran maka melalui forum rapat kinerja ini kami bermaksud melaporkan perkembangan tersebut tentunya laporan secara lengkap akan

kami sampaikan secara tertulis. Adapun realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2019 mencapai Rp1.605,73 miliar atau sebesar 29% dari pagu yang telah disesuaikan.

Bapak dan Ibu yang kami muliakan.

Sebelum menutup pemaparan kami, ijin kami menyampaikan progress penyediaan Gedung Kantor OJK, baik pusat maupun daerah. Terkait dengan Gedung kantor pusat OJK kami telah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan yang tentunya kami juga meng-eksplora ada 3 opsi, diantaranya Gedung PT. Pos dan juga Gedung Dana Reksa, dan terakhir adalah Gedung Lot I Kementerian Keuangan. Namun demikian, PT. Pos ternyata tidak karena PT. Pos maunya menyewakan tidak dijual, sedangkan Dana Reksa sama maunya menyewakan. Namun demikian, yang Lot I ini yang kami eksplora karena bisa kami tempati dengan bukan sewa.

Dapat kami sampaikan bahwa kami telah menandatangani MoU dan PKS dengan Kementerian Keuangan untuk menyepakati penggunaan barang milik negara di lokasi Lot I kawasan Sudirman, yaitu di sentral bisnis distrik Sudirman Jakarta. Sementara itu untuk kantor OJK di daerah kami telah melakukan serangkaian *ground breaking* pembangunan kantor OJK Papua, Solo dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nanti ini akan segera untuk di NTB, ini adalah tanahnya sudah kita beli ya dan ini tinggal kita membangunnya. Dan ini dilakukan kita tentunya mendapat support penuh dari Pemerintah Daerah setempat.

Kami harapkan pembangunan kantor daerah ini akan selesai pada tahun ini, sedangkan pembangunan kantor pusat tentunya masih perlu waktu sampai dengan tahun 2022 dan untuk di daerah akan terus kami lakukan dengan minta beberapa daerah untuk bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk menggunakan tanah-tanah sebelum dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah. Dan dengan pembangunan Gedung kantor ini akan mengurangi beban kita dalam menggunakan uang dengan sewa. Dan kita harapkan anggaran kita akan menjadi lebih rendah masa depan.

Untuk itu sekali lagi kami mengharapkan dukungan Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat dalam merealisasikan upaya kami ini untuk memiliki Gedung kantor pusat dan juga di daerah. Dan juga ini tentunya akan kita bisa lebih konsentrasi pada tugas utama kami.

Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang kami muliakan.

Demikian paparan kami mengenai kondisi perekonomian, kinerja sektor jasa keuangan dan pencapaian kinerja OJK serta realisasi anggaran selama triwulan I tahun 2019.

Sekali lagi atas dukungan dan perhatian Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Demikian paparan dari Ketua OJK kita masuk ke sesi kedua, yaitu pendalaman kita mulai dari sisi sebelah kanan.

Silakan Bapak Heri Gunawan untuk memulai pertanyaan pertama, dilanjutkan dari sisi kiri siap-siap Bapak Haerul Saleh.

F-P. GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan kawan-kawan Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Bapak Wimbo beserta jajaran.

Terima kasih atas paparan yang disampaikan terkait dengan Rencana Kerja OJK yang berhubungan dengan masalah anggaran, demikian dengan implementasi dari sasaran-sasaran strategis yang akan diraih oleh OJK.

Saya masih tertarik dengan catatan yang beberapa waktu lalu kita sampaikan, biasanya dalam kerangka ekonomi makro selama ini yang terlibat adalah Bank Indonesia, Bappenas, BPS dan Kementerian Keuangan. Tetapi dalam rapat terakhir kita coba *sounding* terkait dengan masalah dilibatkannya OJK di dalam penentuan kerangka ekonomi makro.

Dan nyatanya memang sudah disampaikan melalui OJK terkait dengan paparan tersebut. Di mana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% itu membutuhkan investasi kurang lebih 5.800 triliun. Tentunya OJK yang selama ini kita pahami membawahi bidang ataupun pengaturan yang bersangkutan dengan masalah perbankan, pasar modal ataupun IKMB tentunya akan ditopang oleh industry-industri yang ada di wilayah tersebut.

Beberapa waktu yang lalu kami mencoba berkomunikasi dengan industry yang ada di wilayah tersebut. Bahkan sampai hari ini mungkin besok, kemarin juga sudah kita lakukan. Kita coba kemarin berbicara dengan industry asuransi, industry pasar keuangan dalam hal asosiasi pembiayaan, demikian juga dengan bursa efek Indonesia. Karena tentunya dari paparan yang disampaikan oleh OJK terkait dengan 5.800 triliun tersebut itu yang bisa di-*cover* oleh bank kurang lebih diangka 600 triliun. Tentunya sisanya akan berbicara tentang *capital inflow* yang akan diambil dari pasar modal.

Kemarin kami coba tanyakan kepada pasar modal atau Bursa Efek Indonesia, terkait dengan masalah apa langkah strategis yang akan dilakukan sehubungan dengan Rencana Kerja dari OJK, dimana pada saat itu paparan Bapak Ketua sendiri mengatakan akan meraih sampai dengan 186 triliun. Kita ingin tahu seperti apa sih pola yang akan dilakukan. Dan kita juga ingin tahu pola-pola ataupun suku bunga seperti apa atau timbal balik seperti apa yang diharapkan agar proses ini bisa terealisasi.

Kenapa saya berbicara seperti itu? karena patut kita pahami anggaran kita selama ini atau pertumbuhan ekonomi kita stagnan di angka 5%. Kalau investasi ada di angka 3 sampai 3,5% berarti secara riil pertumbuhan ekonomi kita itu hanya 2 sampai 1,5%. Kita pasti akan terus dan terus terjebak disana, di satu sisi kalau keseimbangan kita primer kita negative tentunya ini juga akan menjadi permasalahan untuk APBN kita. Di sisi yang lain sumbernya pendapatan dari pajak dan bea cukai. Kalau disana ternyata *sortfall* secara otomatis akan mempengaruhi postur APBN kita. Kami berharap dapat ditopang oleh OJK dengan Rencana Kerja yang relative lebih bisa terkoordinir dan terealisasikan dengan baik.

Namun, pada kenyataannya kemarin kami coba tanyakan kepada Bursa Efek Indonesia. Kelihatannya belum matching ini antara apa yang disampaikan oleh OJK selaku regulator pada saat kita Rapat Kerja dengan OJK, dengan Menteri Keuangan, Bappenas dan BI dengan apa yang kami peroleh atau kami gali dari pelaku industry itu sendiri.

Ini ada kurang matching sehingga agak sedikit pesimis buat kami apakah rencana Pemerintah ini yang berbicara tentang pertumbuhan ekonomi akan tercapai atau tidak. Kenapa saya berbicara seperti ini karena ini pasti secara otomatis ini juga akan merembet contoh kasus disini kalau kita lihat dari paparan strategis yang disampaikan disini ada MoU tentang pengembangan industry kreatif. Kemarin kami sudah berbicara dengan asosiasi perusahaan pembiayaan disini melakukan MoU dengan APPI, mereka sendiri kesulitan, karena APPI ini perusahaan pembiayaan yang notabene permodalannya itu diambil dari perbankan dana pihak ketiga. Malah dari dana pihak ketiga yang ada di Indonesia relative menurun dibandingkan pinjaman luar negeri. Sementara mereka melakukan pembiayaan relative lebih banyak ke bidang-bidang hanya berbicara tentang otomotif, disini berbicara industry kreatif, ada MoU untuk implementasi sasaran strategis kedua. Tentunya ini agak sedikit melebar juga.

Hal lain kalau memang terjadi *sortfall* sesuatu yang tidak tercapai tentunya akan berimbas kepada negara ini atau Pemerintah akan berhutang. Saya kok melihat akan terjadi hal yang sama dengan OJK juga kalau melihat disini dari paparan yang disampaikan terkait dengan masalah anggaran. Kalau kita lihat disini dari data yang disampaikan tadi anggaran yang disampaikan oleh OJK nampaknya dari 5 koma sekian triliun itu banyak yang tidak tercapai dari masing-masing pos. Contoh dari perbankan, dari perbankan disitu ada selisih kurang lebih 84.439, diantara 3,7 tercapai 3,6 ini dari realisasi pungutan 2018. Kami tidak tahu, ini tidak tertagih ataukah industrinya tutup, karena kan dana yang diperoleh ini dari premi yang diberikan oleh industry kepada OJK, ternyata kan realisasinya berbeda disini ada selisih 149 nyaris 150-an. Inikan tidak jauh berbeda seperti postur APBN kita. Nah, kami mohon penjelasan apa memang industrinya yang tidak jalan ataukah ada hal lain yang menjadi dasar pertimbangan karena kita berbicara untuk 2018 dan RKA 2019, ini tidak jauh berbeda, demikian industry-industri penopang yang ada di bawah seperti perbankan, IKMB, ataupun pasar modal nampaknya belum mendukung secara penuh kebijakan OJK untuk turut berkembang atau menentukan pertumbuhan ekonomi dengan langkah-langkah strategis apa yang akan diraih. Kurang lebih demikian.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Silakan Bapak Haerul Saleh, siap-siap Ibu Elviana.

F-P. GERINDRA (HAERUL SALEH, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Ketua Dewan Komisiner OJK beserta Komisiner OJK dan seluruh jajaran OJK
yang hadir pada sore hari ini.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Shalom,

Om swasti astu,

Namo budaya.

Kalau lihat dokumennya sih kelihatannya pungutan berlebih Pak, ini cantik soalnya tampilannya. Jadi Pak Heri yang dipersoalkan tadi itu, itu sebetulnya sebagian kecil dari banyaknya persoalan-persoalan industry keuangan yang sebetulnya ingin kami dalam di sini, tetapi mungkin ada sesi lainnya.

Untuk kesempatan kali ini, mungkin saya lebih kepada persoalan internal dululah. Kita tahu OJK inikan dulu dibentuk karena sudah diprediksi sebelumnya bahwa kedepan industry keuangan ini akan berkembang. Artinya ini sebuah keniscayaan, ada OJK atau tidak ada OJK industry keuangan ini pasti akan berkembang. Nah, OJK ini dilahirkan untuk betul-betul bisa mengoptimalkan tugas, fungsi, pengaturan dan pengawasan itu sendiri.

Nah, oleh karena itu tentu saja sangat diharapkan kepada komisiner yang melaksanakan tugas-tugas ini betul-betul bisa melaksanakan itu secara optimal dan sesuai dengan amanah Undang-Undang. Kita tahu Bapak, ini terkait dengan temuan BPK RI yang sudah disampaikan dan saya sendiri pernah menanyakan hal ini khusus terkait dengan sewa Gedung. Masalah sewa Gedung ini yang kemudian tidak dimanfaatkan ini betul-betul mencerminkan inefisiensi daripada penentu kebijakan yang ada di OJK. Nah, kita ini sebagai pengatur Pak, kita kan OJK inikan pengatur, mengatur orang, sementara kita sendiri tidak memberikan contoh yang baik kepada industry. Kita harusnya memberikan contoh ya mengoptimalkan segala sumber daya, lalu kemudian inefisiensi di segala bidang. Ini semuanya gambaran-gambaran kecil yang akan ditangkap oleh industry daripada pengaturnya sendiri. Bagaimana mereka mau bisa diatur kalau misalnya pengaturnya ini tidak memberikan contoh yang baik.

Dulu saya pernah mendapatkan jawaban bahwa ini adalah kebijakan lama. Kebijakan lama yang bagaimana? saya kurang mengerti di sini. Sebab, begini bayangkan saja kalau cara berpikir ini kita gunakan. DPR RI yang lalu menentukan,

menetapkan misalnya pembangunan Gedung kantor dengan anggaran 16 miliar, terpilih periode yang baru kemudian tidak menyetujui hal itu, kira-kira yang sudah dibangun itu mau diapakan.

Nah, artinya cara berpikir yang demikian ini saya kira perlu diluruskan dan kami di Komisi XI DPR RI saya sendiri merasa bertanggungjawab secara moral terhadap tugas kami melakukan pengawasan atas kinerja OJK dalam melaksanakan tugasnya. Kalau kami ini melakukan pembiaran dan tidak menyampaikan hal ini ya bagi saya, saya juga bersalah.

Saya tidak mau terlalu jauh membahas masalah industry, saya sudah keliling bertemu dengan pelaku-pelaku industry dan permasalahan-permasalahannya tidak sedikit. Urusan perbankan misalnya dan ada satu hal lagi, komisionernya katanya sulit ditemui, sulit komunikasi, yang perbankan siapa? Bapak Heru ya. Ini justru yang paling banyak masalahnya, tapi paling tidak komunikatif. Yang selalu diwakilkan oleh siapa katanya ada Bapak Slamet.

Ini ada beberapa informasi yang saya temukan dan ini fakta, mereka tidak mungkin berbohong, sebab mereka ini inefisiensi yang dilakukan oleh OJK terhadap penggunaan uang hasil pungutan itu melukai hati pelaku industry. Bayangkan saja kalau uang kita dipungut-pungut sedikit-sedikit, terus dipakai foya-foya sama orang yang mungut, sakit hati tidak? Sakit hatilah, hanya industry ini tidak memberikan wujud sakit hatinya secara nyata. Ini betul Pak, ini kita pakai cara berpikir yang sederhana saja dan itu adalah amanah Undang-Undang. Undang-Undang sudah mengamanahkan kepada OJK untuk menggunakan pungutan itu secara optimal dan efisien. Dan kalau itu tidak digunakan berarti kita melanggar Undang-Undang. Dan termasuk kami kalau tidak menyampaikan hal ini, tidak mengevaluasi bersama dengan OJK ya kita juga bersalah.

Untuk itu Pimpinan, sebelum kita membahas terlalu jauh terkait dengan permasalahan industry, ada baiknya kita melakukan evaluasi terhadap hasil termuan BPK yang kemarin sudah disampaikan. Dan ini penting bagi saya untuk bagaimana ke depannya OJK ini bisa berkembang.

Selain itu, soal Gedung saya sudah tiga kalau kalau tidak salah menyampaikan hal ini. Kali ini kita bagaimanalah kita sepakat saja Pak, mari bersama-sama kita pikirkan terkait dengan Gedung ini supaya tidak menjadi masalah dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun permasalahan utama kita adalah Gedung kantor termasuk yang kita bahas tadi masalah temuan BPK RI.

Yang akan menggunakan Gedung kantor inikan sebetulnya Kementerian Negara, dulu awalnya OJK ini berdiri anggaran yang digunakan APBN. Untuk itu, kenapa kita tidak mencoba berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan agar efektif dan bisa menunjang pertumbuhan ekonomi sesuai dengan yang diharapkan, tidak ada gangguan-gangguan internal terkait dengan permasalahan kantor ya kita minta dianggarkan di APBN kalau misalnya pungutan itu ternyata tidak mencukupi. Karena kalau dari tahun ke tahun kita bahas nanti pergantian komisioner lagi dia tidak setuju dengan apa yang sudah dibangun oleh komisioner yang sekarang, sudah ganti lagi, tidak suka lagi Bapak sewa Gedung misalnya, membangun Gedung sudah setengah, komisioner yang akan datang merasa ini tidak cocok, tidak pantas ya ganti lagi.

Sehingga akan terjadi terus menerus permasalahan yang tidak akan berakhir. Artinya, ya tidak akan pernah efektif, tidak akan pernah maksimal kinerja daripada OJK.

Dan yang kedua, sumber daya manusia ini sangat kurang kalau menurut saya Pak. SDM di OJK ini perlu ditambah sebanyak-banyaknya lah, kasian kalau misalnya kayak tadi hanya Bapak Slamet Edy saja yang jalan itu. Saya sudah 11-an lah perbankan yang saya temu. Saya ketemu semuanya ngomong, bagaimana dengan Bapak Heru komunikasinya. Itu dia masalahnya kita yang selalu dihadapkan sama Bapak Slamet Edy, wah gawat itu Slamet itu siapa, komisioner juga? Komisioner baru barangkali.

Saya kira itu Bapak Pimpinan, yang mungkin menjadi perhatian. Jadi khusus untuk masalah internal saja Pak, agar kita bisa melihat OJK ke depannya ini bisa lebih baik dan lebih professional dan memenuhi espektasi industry serta seluruh masyarakat Indonesia.

Demikian Pimpinan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Haerul.

Silakan Ibu Elviana siap-siap Bapak Refrizal.

F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK beserta seluruh jajaran yang juga saya hormati.

Pertama, terima kasih atas penjelasan Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK tadi, sehingga ada beberapa pertanyaan yang tidak jadi kita pertanyakan. Kemudian saya memulai dengan karena memang dengan adanya keputusan bahwa DPR RI tidak bisa melihat uraian belanja mitra memang satu-satunya alat bagi kami untuk melaksanakan tugas pengawasan. Kemarin kami sudah rapat dengan BTN, kita juga rapat besok dengan BNI dan Bank Mandiri. Harusnya dengan ketiga bank plat merah itu kemarin, sehingga kami punya modal untuk rapat dengan Bapak tapi karena Dirutnya berhalangan kita hanya bisa rapat dengan BTN.

Dan temuan kita dapat rapat kemarin memang ujung-ujungnya kami mempertanyakan kembali kepada peran OJK. Nah, dimana misalnya di BTN uang nasabah hilang itu masih terjadi. Di BNI setelah saya baca-baca juga itu msih terjadi, sementara siapa yang melindungi nasabah soal-soal perbankan? Orang pasti akan ngomong OJK, kalau jaminanya sudah jelas nanti LPS.

Jadi yang pertama, saya minta Bapak Ketua Bapak Wimbo bisa menjelaskan adanya penilaian masyarakat OJK itu dinilai boros menggunakan uang iuran. LPS itu juga uang iuran ya Pak, tapi mereka tidak tersebut betul kalau uang yang mereka pegang itu sebenarnya uang bank juga. Tetapi kenapa kayak OJK itu selalu didengarkan anda menggunakan uang bank loh atau pendekatan OJK yang kurang bagus kepada perbankan atau bisa jadi perbankan belum begitu menikmati peran OJK dalam hal memasyarakatkan perbankan kepada masyarakat atau mendekati perbankan kepada masyarakat.

Kemarin Pak, hari Jumat yang lalu saya ajak OJK Jambi sosialisasi di sebuah daerah makmur transmigrasi, itu daerah di Kabupaten Tebo, teman-teman suku Jawa banyak disitu. Ketika Bapak Endang itu menjelaskan apa itu investasi bodong, kalau anda ingin berinvestasi itu juga ikutlah yang pertama, karena peserta yang berikutnya itu akan digunakan untuk membayar keuntungan anda. Ketika mereka tidak lagi mendapatkan nasabah-nasabah baru, barulah muncul masalah. Semua peserta itu termenung Pak, lalu saya jalan. Jalan sambil paparan, rupanya itu mulai terjadi di daerah yang jauh dari pusat kota. Ada namanya zero, ada 4 lembaga yang sudah masuk ke daerah-daerah menawarkan koperasi dia bukan koperasi.

Belum lagi fintech itu Pak, fintech P to P itu juga korban disana, akhirnya acara kami baru selesai sampai Magrib, karena tidak terlayani pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu baru sartu titik Pak. Oleh sebab itu, saya mendorong kalau masih bisa direvisi anggaran ini, sebenarnya anggaran OJK itu lebih banyak ke daerah Pak, karena problem-problem keuangan itu ya di daerah. Itu untung saja ada Komisi XI DPR RI Dapil Jambi di Jambi itu. Artinya, banyak masyarakat menikmati sosialisasinya. Maksudnya saya bandingkan daerah provinsi yang tidak ada Komisi XI DPR RI, darimana mereka dapat pengetahuan-pengetahuan, tidak mengerti fintech yang penting mereka bilang “sekarang ada rentenir online Ibu Elviana”, rentenir pinjam sejuta langsung dipotong 200 ribu. Ketika tidak mampu membayar datang lagi tawaran yang lain, ternyata mereka satu group.

Jadi maksud saya kami tidak bisa pula membuat Bapak-bapak, geser-geser anggarannya kami juga tidak tahu. Tapi pesan moral saja kepada OJK lebih banyaklah digunakan untuk gerakan inklusi keuangan itu Pak. Mau dibuat sederhana programnya bisa, apakah melalui televisi misalnya. Yang paling bagus itu memang seperti kelompok-kelompok masyarakat klopencapir seperti yang kita lakukan kemarin, karena korban-korbannya langsung berbicara kepada OJK.

Saya berharap memang saya bilang kepada Bapak Endang kemarin kalau kamu ada sisa-sisa uang nanti lanjutkan ke desa-desa yang lain. Agar sekali masyarakat merasa tertolong, jadi sosialisasi OJK bukan hanya mengenalkan apa itu OJK bukan itu, tetapi apa problem mereka di bidang keuangan dan diharapkan meminimalisir korban-korban industry jasa keuangan yang ilegal itu.

Saya kembali fintech P to P, kita sedikit sekali waktu kita untuk membahas itu, pernah satu kali FGD dan satu kali disini. Kita dulu sudah membayangkan ini akan jadi masalah tidak? Ternyata benar gitu ya akan bermasalah. Belum lagi dimana negara bisa mendapatkan pajak dari pinjaman online ini. Jadi dari segi pinjaman ada palsunya, karena yang Bapak paparkan tadi ada berapa ratus fintech yang legal.

Di tulisan lain saya baca juga, OJK tidak berdaya terhadap fintech P to P yang tidak berijin. Nah, tambah lagi kan dulu kita bahas disini masyarakat jadi korban terhadap pegadaian yang tidak berijin. Bagaimana ini Pak, disini muncul tidak berijin asuransi nanti pasti muncul lagi yang tidak berijin. Oleh sebab itu, gunakan anggaran ini untuk ujung-ujungnya menolong masyarakat.

Terakhir Pimpinan, soal Gedung. Jika membangun Gedung itu lebih efektif dari sewa. Saya bicara Dapil saya Jambi misalnya, saya mendorong OJK di periode Bapak itu infrastruktur OJK di perodenya Bapak Wimbo. Nah, karena biaya inklusi dan segala macam itu nanti akan langsung terangkat ketika fasilitas di daerahnya sudah mencukupi.

Demikian Pimpinan, mohon maaf kalau ada yang salah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, kita ke Bapak Refrizal silakan, siap-siap Bapak Misbakhun.

F-PKS (H. REFRIZAL):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak-bapak Komisioner Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Komisioner OJK yang saya hormati.

Saya ada dua point yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ini hasil kita bersosialisasi ini termasuk dengan OJK di Sumatera Barat tentang KUR. Saya melihat harus dipetakan kayaknya KUR ini Pak. Kalau di Sumatera Barat kan cepat sekali serapnya. Kenapa cepat sekali serapan di Sumatera Barat? Karena di Sumatera Barat ini memang tidak ada usaha yang besar sekali. Adanya banyaknya adalah usaha kecil, usaha rakyat ini yang banyak. Makanya ketika tiket naik itu yang sangat terpukul adalah salah satunya adalah Sumatera Barat. Kerajinan-kerajinan atau kuliner-kuliner di Sumatera Barat yang keripik dan rendah itu yang termasuk sangat terpukul. Nah, maksud saya ini makanya KUR-nya harus dipetakan, porsi untuk yang daerah-daerah yang cepat menyerap ini harus ditambah gitu porsinya harus diperjuangkan untuk masa yang akan datang. Sehingga bukan kita inikan bukan menganut, keadilan itukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Yang kedua, saya membaca atau banyak juga di wawancara tentang Amerika juga akan mengalami krisis. Nah, katanya belum krisis saja Amerika ini sudah berdampak sama kita. Baru perang dagang saja dia sama Cina sudah berdampak sama kita. Contohnya saja kita susah mempertahankan, memperkuat Rupiah kita ini, sekarang pun kita dalam makro kemarin 14.000 sampai 14.500 asumsi makro Bapak

Wimbo juga ikut hadir. Artinya, tidak ada penguatan lebih akhirnya Rupiah akan tetap melemah terus dari masa ke masa. Janji Bapak Jokowi saja dulu untuk jadi Presiden dulu Rupiah itu inginnya 10.000 sekarang nantang antara 14.000 sampai 14.500. Nah, kalau terjadi krisis di Amerika ini yang ingin saya tanyakan kepada OJK sebagai pengawas dan juga sebagai yang 3 fungsi itu masalah keamanan daripada nasabah kita adalah perbankan yang kita bahas. Bagaimana ini kedepan yang harus diantisipasi sebagai OJK ini. Nah, inikan kalau kita mempersiapkan kalau hujan itu bukan ketika hujan kita menyiapkan payungnya. Jangan sampai sudah hujannya lebat, sudah banjir baru disiapkan payungnya. Nah, ini yang harus diantisipasi, syukur-syukur tidak ada terjadi di Amerika ini, tapi sudah ada banyak wacana akan terjadi krisis di Amerika yang kemungkinan besar karena Amerika ini adalah negara besar dia akan berdampak kepada kita di Indonesia.

Saya kira dua itu saja pointnya, itu yang sangat penting tadi adalah salah satunya adalah masalah KUR tadi di Sumatera Barat.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Refrizal.

Bapak Misbakhun silakan, siap-siap Bapak Amirul Tamim.

F-PF (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

**Pimpinan Komisi XI DPR RI yang saya hormati,
Anggota Komisi XID DPR RI yang saya hormati,
Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK beserta Anggota Komisioner OJK yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran OJK, masih bulan Syawal belum habis. Mudah-mudahan rapat triwulan I 2019 ini akan menjadi tradisi bagi kita di Komisi XI DPR RI untuk periode-periode berikutnya, sehingga kita semakin sering berkomunikasi untuk saling mengukur kinerja dalam rangka menjalankan tugas masing-masing kita kepada negara.

Pertama, saya ingin menyampaikan tadi apa yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK. Kita kemarin rapat dengan sebenarnya Pak, tadi saya juga ingin menambahkan yang disampaikan oleh Bapak Heri. Kita kemarin itu rapat dengan asuransi dan bursa efek, sebenarnya ada rapat

kemarin dengan bank-bank milik Pemerintah, BUMN, untuk mengetahui bagaimana sih perkembangan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap kinerja perbankan. Kalau asuransi ya tentunya dengan IKMB-nya, bursa efek tentunya dengan NIM. Dengan bursa efek kita ingin mengetahui sampai seberapa jauh tugas-tugas pengawasan dan perlindungan konsumen yang dijalankan oleh OJK sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Kemarin saya menemukan satu hal berkaitan dengan asuransi jiwa, ternyata ada POJK mengenai perlindungan konsumen. Itu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) itu menyampaikan bahwa meminta Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menyesuaikan dengan POJK bunyinya. Inikan dari sisi hirarkis tentunya kan justru Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu yang menjadi patokan dan rujukan bagi OJK dalam menyusun POJK-nya, lah ini kok justru industrinya meminta Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyesuaikan dengan POJK mengenai perlindungan konsumen yang ada di POJK. Saya belum membaca apa yang menjadi pertentangan, tentu disini ada ketidak sesuaian. Tapi saya meminta agar OJK ini juga memperhatikan hal-hal hirarki Undang-Undang, karena saya juga memperhatikan ada POJK yang berkaitan dengan masalah penerbitan surety bond sebagai bentuk amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 itu sampai sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 berjalan mulai Januari 2016 tanggal 19 kalau tidak salah. Ini di sahkan dan dalam waktu 2 tahun masa transisi dan 3 tahun akan berjalan secara sepenuhnya, dan tahun ini sudah berjalan sepenuhnya. Itu mengenai surety bond, POJK-nya masih membolehkan bahwa asuransi umum itu penerbitkan surety bond, padahal jelas aturan Undang-Undang Penjaminan itu surety bond itu adalah produk yang hanya boleh diterbitkan oleh perusahaan penjaminan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi itukan hanya berbicara tentang bahwa proyek jasa konstruksi dan sebagainya itu boleh dijamin dengan salah satunya diantaranya adalah surety bond yang kemudian bisa diterbitkan tidak mengatur tentang bagaimana perusahaan asuransi ini. Dan di dalam Undang-Undang Asuransi itu sendiri tidak ada nomenklatur bahwa produk asuransi itu diantaranya adalah surety bond. Ini perlu saya sampaikan di dalam rapat ini untuk kita sama-sama mendisiplinkan diri kita dalam sebuah tugas kita masing-masing, karena sebagai pengawas tentunya OJK harus berdasarkan kepada pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri.

Kemudian berikutnya yang kedua, saya ingin menyampaikan kemarin kita tanyakan kepada pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal tahun 1995 kalau menurut saya perlu kemudian disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Karena apa? Undang-Undang Pasar Modal ini sudah sangat lama, kemudian sistem juga banyak berubah, pasar juga banyak berubah, sistem ekonomi kita juga banyak berubah. Dan inikan Undang-Undangnya kan tahun 1995 itukan sebelum reformasi, sementara Undang-Undang yang baru itukan banyak didorong oleh semangat reformasi kita, termasuk di sektor keuangan. Nah, ini dalam rangka apa? juga ingin mengangkat bagaimana kinerja keuangan di pasar modal itu juga semakin bagus. Bagaimana proses IPO, BUMN bisa lebih mudah, orang melakukan mungkin sistem *listing* kita juga akan lebih kuat dan sebagainya. Nah, inilah kalau menurut saya perlu termasuk di

dalamnya dengan Undang-Undang PPKSK karena apa? tadi saya lihat paparannya, saya agak keluar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua ini tadi bagi saya sudah cukup bagus dari sisi norma bagaimana OJK ini beroperasi dan dijalankan. Nah, inikan kita diluar itu yang ingin disampaikan. Karena apa? *beyond of daily activities* kita itukan ada sesuatu hal yang memang harus kita diskusikan.

Kemudian mengenai Undang-Undang OJK ini sendiri Pak, begitu protokol kita mengenai krisis itu ada Undang-Undang PPKSK. Nah, inikan harus ada kebutuhan yang mendesak bukan karena OJK-nya tetapi karena kebutuhan terhadap protokol kirisita kita. Karena apa? lahirnya OJK ini juga bagian dari lahirnya proses bagaimana kita memitigasi resiko, pengawasan kita perkuat dan sebagainya. Salah satu Pak, membuat ekonomi kita *well* tadi Bapak Refrizal bicara krisis di Amerika dan sebagainya, Pemerintah bisa tidur tenang dan sebagainya karena OJK bekerja dalam menjalankan pengawasan. Bagaimana kemudian industry itu menjadi sangar *alert* begitu OJK datang, baik itu di asuransi, di pembiayaan, di perbankan, karena OJK-nya bekerja dengan baik. Tetapi inikan hal-hal yang mempunyai dalam menjalankan proses dan sistem itu ada *weakness-weakness* yang memang mau tidak mau harus kita tutup untuk memperkuat kesempurnaan yang kita miliki. Nah, itu salah satunya Pak.

Kita ingin bahwa menjadi konsen kita bahwa Undang-Undang Pasar Modal ini harus kita perkuat dan harus kita definisikan kembali mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan aturan dan regulasi di pasar modal dalam kaitan Undang-Undang, ini penting Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah tadi Ibu Elviana bicara soal satuan 3 di anggaran. Setahu saya putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya berkaitan dengan APBN. Dan kalau menurut saya OJK tidak berkaitan dengan satuan 3 dan apapun, kita di OJK, BI tidak ada larangan. Kita perlu mendapatkan detail itu tidak ada masalah kalau menurut saya, karena yang menjadi gugatan materi dan sebagainya itu adalah APBN. Dan apa yang menjadi topik dan detail OJK itu adalah bukan anggaran yang ada di APBN dan bukan bagian dari APBN sehingga tidak menjadi penghalang bagi kita untuk membicarakan secara detail tentunya dengan memperhatikan aspek-aspek banyak hal, misalnya kerahasiaan, kepentingan-kepentingan yang lebih besar sehingga kita bisa mungkin rapatnya dalam forum yang tertutup dan sebagainya.

Kemudian yang berikutnya Pak, tadi Bapak menjelaskan mengenai pembangunan, saya masih membicarakan mengenai Undang-Undang OJK-nya tadi. Saya ingin menambahkan, karena apa? di dalam anggaran ini saya melihat tadi ada satu titik lemah walaupun itu bersifat klausul yang leg spesialis, tetapi tidak *miss match*. Bagaimana pendapatan tahun ini dipakai untuk tahun berikutnya, dari prinsip akuntansi inikan sudah tidak menyalahi *revenue againt the cost*. Prinsip yang paling utama, filosofi akuntansi yang mengatakan *revenue againt the cost*, pada waktu yang sama. Nah, inikan perlu kesempurnaan dalam Undang-Undang OJK Pak, sehingga apa yang diprediksi karena apa? penerimaan tahun ini bisa saja kemudian apa yang menjadi pengeluaran OJK tahun berikutnya itukan menjadi berbeda.

Kemudian saya masih beranggapan dan masih sangat menganggap penting bahwa OJK ini masih perlu APBN. Karena apa? tugas OJK ini sangat-sangat penting di dalam menjalankan peran negara di dalam pengawasan industry keuangan.

Kehadiran negara ini sangat penting, contoh sederhana tadi saya sangat setuju misalnya Bapak Ketua tadi menyampaikan bahwa ada barang milik negara itu yang digunakan oleh OJK dalam membangun Gedung. Tadi untung Bapak Ketua sudah menyampaikan bahwa itu barang milik negara, tapi Menteri Keuangan belum menyampaikan kepada kita, karena apa? secara kelembagaan OJK itu adalah lembaga negara tetapi barang milik negara yang dimanfaatkan OJK inikan akadnya harus jelas Pak. Menjad miliknya OJK ini sekalian tanahnya atau penguasaannya, karena apaa? Begitu kita bicara tentang aset, Bapak Achmad Hidayat tentu tahu sebagai akuntan beliau tahu bahwa siapa yang menguasai, siapa yang menggunakan dan siapa yang memanfaatkan inikan harus siapa yang menguasai terhadap aset barang milik negara inikan harus jelas.

Nah, nomenklatur OJK sebagai lembaga negara itukan bagiannya ada dimana. Dan kemudian berikutnya yang menjadi pertanyaan yang agak mendetail yang tadi saya sampaikan adalah Gedung ini dipakai atau digunakan, dibangun pertamanya Pak, itu dengan mekanisme apa. Menggunakan BOT, melibatkan pihak ketiga, melibatkan Pemerintah atau apa, karena kalau saya lihat tadi Bapak menyampaikan tentang proporsi anggaran saya tidak menemukan anggaran misalnya OJK itu membangun Gedung dan sebagainya. Tapi cuma Bapak menyebutkan bahwa akan membangun Gedung dimana saja dan sebagainya, tetapi yang utama di Lot I itu. Kalau tadi Bapak menyebutkan juga misalnya ini dibantu oleh Pemerintah, misalnya di Jogja oleh Pemerintah Daerah dan sebagainya, kita juga ingin tahu itu Pak. Karena apa? jangan sampai kemudian di kemudian hari kita membanggakan OJK dengan yang begitu itu ternyata barangnya milik OJK gedungnya akan tetapi tanahnya tidak. Atau kemudian kalau dihibahkan ya pengakuan hibahnya harus menjadi struktur aset dalam pengakuan di OJK. Ini penting Pak, jangan sampai kemudian kita kemudian ada permasalahan hukum di hal-hal seperti ini. Kita belajar banyak Pak, dari kasus bagaimana terjadi pergeseran komisioner, saya tidak ingin membahas lebih detail tentang bagaimana Gedung yang belum tergunakan itu nanti topik yang lain.

Saya ingin memberikan kepada sebuah tatakan yang itu. Karena apa? legacy Bapak yang baik ini jangan sampai kemudian dibaca yang berbeda oleh kemudian kalau terjadi pergantian komisioner, ini yang paling penting Pak. Karena kalau Bapak sudah bisa men-claim misalnya Gedung yang di Lot I yang sangat prestisius itu melibatkan pihak ketiga, pihak ketiganya siapa, melalui proses apa, barang milik negaranya sudah diserahkan kepada OJK dari Kementerian Keuangan oh tidak. Kita hanya bisa memanfaatkan ruangnya atau kita hanya dapatkan hak pakai atau kita kemudian hak pakai yang diserahkan kepada kita.

Ini penting karena apa? ini adalah untuk menjaga utama, karena Bapak adalah lembaga negara yang tugasnya sangat penting dan perlu punya *prestice* itu Pak. Dan negara juga kalau menurut saya tetap harus hadir di dalam tugas-tugas membiayai keuangan negara. Kepada apa? kadang-kadang Pak, seringkali orang-orang industry itu kalau dipanggil ke DPR RI selalu berkeluh kesah tentang biaya mereka yang melonjak karena adanya pungutan. Pada saat yang sama jangan sampai terjadi moral hazard karena tugasnya mengawasi “masa gue yang ngawasi, gue yang biayai, terus gue diawasi, terus gue kena pinalti”. Nah, bahasa itukan jangan sampai terjadi.

Akhirnya secara kelembagaan OJK-nya yang merasa dibiayai oleh industry juga *ewoh perkewoh* terhadap sumber pendanaan ini. Ini kalau benturan kepentingannya seperti ini jangan sampai kemudian membuat kredibilitas secara kelembagaannya OJK inikan, kita juga ingin tahu seperti apa rencananya. Kalau perlu kita mengatakan bahwa contoh sederhananya mengkuantifikasi beban negara yang dijalankan oleh OJK dan manfaat dan sebagainya kan kita bisa mengantisipasi Pak. Dan harus dibebankan kepada APBN atau misalnya operasionalnya tetap oleh industry dan kemudian pembangunan infrastruktur sarana dan prasarananya harus melalui APBN dan itu menjadi barang milik negara yang dikuasakan oleh OJK dan sebagainya.

Nah, hal-hal yang seperti inikan menjadi sangat penting. Karena apa? PB event kita yang namanya OJK yang sekarang sudah berumur 8 tahun inikan harus jalannya harus kita tolong terus, kita bimbing dalam sebuah bimbingan yang baik dan kemudian menjadi remaja yang menurut saya dibekali dengan pengetahuan dan sebagainya. Nah, ini kalau menurut saya perlu menjadi penting keterbukaan Pak. Kita ini kalau sama OJK sayang sekali Pak, kita tidak ingin aneh-aneh, OJK ini jalannya bagus, karena apa? tanggungjawab OJK ini sangat besar sekali. Perbankan berapa? Sekarang kalau tidak salah sudah ribuan triliun yang perbankan, di pasar modal maupun di pembiayaan dan lain sebagainya. Inikan harus menjadi tanggungjawab kita semua. Lembaga ini menjadi kuat, tapi punya kredibilitas, fasilitas memadai, dan menggambarkan terhadap kewenangan yang sesungguhnya mereka miliki berdasarkan regulasi yang ada. Jangan sampai kayak KPK kemarin tugasnya memberantas korupsi akan tetapi tiba-tiba audit BPK-nya WDP, kan rusak namanya mereka. Suruh *against corruption* tapi mereka sendiri ada korupsi di dalamnya. Tugasnya mengawasi akan tetapi dalam kontrol Bapak sendiri lain. Saya tidak ingin membandingkan sebagai sebuah perbandingan yang setara akan tetapi jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu.

Itu saja Pak, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan tradisi kita membangun pengawasan secara triwulan ini menjadi tradisi yang baik sehingga kita bisa saling membangun sinergi dan menguatkan dan menumbuhkan diantara tugas dan kewenangan kita kepada negara.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Luar biasa Bapak Misbakhun, kuliah itu.

Bapak Amurul Tamim silakan, siap-siap Bapak Andreas.

F-PPP (Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, para Anggota Komisi XI DPR RI dan Bapak Ketua Dewan Komisiner OJK beserta seluruh jajarannya.

Paparan tadi saya kira memberikan gambaran yang cukup baik bagi kita semua. Cuma saya ingin mungkin mendapat gambaran, kalau Bapak di akhir tadi bahwa ada 5 kebijakan strategis dalam tahun 2019 ini. Dari 5 itu ada 2 yang menarik, yang terkait dengan autentik pembiayaan sektor strategis Pemerintahan obligasi. Tadi di gambarkan bahwa ada beberapa daerah provinsi yang di kawasan timur saya hanya melihat Sulawesi Selatan. Ini bisa menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi yang tumbuh di masa-masa yang akan datang itu akan bertumpuk di kawasan barat. Semua potensi ekonomi kita akan bergerak dan tumbuh di kawasan barat, sementara di kawasan timur yang kalau kaitkan dengan strategi yang kedua di pertumbuhan ekonomi untuk mendorong industry investasi, pariwisata dan lain sebagainya ini kalau kita melihat dari potensi-potensi bahan baku untuk industry, baik itu untuk ekspor dan lain sebagainya itu berada di sana.

Jadi mungkin perlu ada gambaran dalam paparan untuk bisa kita memahami, ada gambaran secara regional kinerja keuangan kita ini khususnya yang terkait dengan OJK ini ada gambaran-gambaran sehingga nanti bagaimana pembiayaan kegiatan-kegiatan ekonomi di setiap kawasan itu, itu ada skala prioritas dan tidak mengharapkan saja orang-orang daerah yang punya keterbatasan ini paling main dengan KUR, main dengan malah kalau saya lihat fenomenanya fintech-fintech yang masuk ini yang mungkin lembaga-lembaga pembiayaan yang mungkin bodong dan lain sebagainya ini merajalela di daerah, sehingga tidak bisa merangsang tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita harapkan menopang kegiatan ekonomi lebih besar.

Kita lihat ada beberapa fenomena yang saya lihat, saya melihat di kawasan timur katakanlah seperti PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Itu beberapa sana saya lihat ada yang terpaksa harus menjual PKS-nya itu karena mungkin tidak bisa tumbuh, apakah terkait dengan masalah-masalah pembiayaan atau faktor-faktor lain yang mungkin ikut mempengaruhi.

Begitu juga ketika kegiatan ekonomi masyarakat katakanlah seperti harga-harga komoditas begiotu anjlok dan lain sebagainya itu ikut mempengaruhi. Di akselerasi, di kebijakan strategis yang ini Bapak tadi mengatakan bahwa akan menumbuhkan kawasan-kawasan ekonomi khusus. Saya belum mendapatkan gambaran, kawasan-kawasan ekonomi khusus mana yang potensial untuk didorong. Itu tidak kelihatan, malah kalau kita lihat fenomenanya kita semua bertumpuk disini. Kita harapkan pelaku-pelaku ekonomi besar itu, itu ada ke daerah, ada ke daerah dan tentu kita mendukung langkah-langkah Bapak untuk bagaimana mensinergikan dengan lembaga-lembaga lain. Yang belum nampak yaitu bagaimana mensinergikan dengan langkah-langkah Pemerintah Daerah. Besarnya transfer daerah yang jatuh di daerah tapi belum sinkron sinergi dengan langkah-langkah bagaimana untuk menumbuhkan kekuatan ekonomi di daerah, itu belum nampak betul. Kalau ini bisa

disinergikan saya kira apa yang kita harapkan untuk pertumbuhan penanganan industry pariwisata dan lain sebagainya.

Yang terakhir ini kita lihat dengan harga tiket, tidak koneksitasnya pesawat dan lain sebagainya sektor-sektor pariwisata ini, ini banyak yang terpaksa hidup juga berat, mati juga enggan. Beberapa kita lihat tingkat hunian hotel dan lain sebagainya khususnya di daerah itu sangat rendah. Industri-industri kuliner yang mereka semua adalah nasabah-nasabah dari bank, itu juga ikut berpengaruh.

Yang mungkin ingin saya dapatkan gambaran atau mungkin yang saya harapkan gambaran-gambaran terkait dengan secara regional Pak, bahwa di region ini gambarannya seperti ini dan kita harapkan bahwa sektor yang harus dimainkan disitu adalah sektor yang bisa diharapkan menumbuhkan kawasan itu. Ini kalau kita masih bermain seperti ini pada masa yang akan datang yang tumbuh itu kawasan barat saja Pak. Kami di sana itu tidak tentu, fenomenanya sudah ada. di Kendari industry untuk pengolahan kakao, padahal disana sumbernya kakao itu juga tidak bisa jalan. Seperti juga saya katakan tadi pabrik-pabrik kelapa sawit di beberapa tempat dikawasan di daerah Sulawesi itu banyak yang terpaksa menjual. Konon ada kaitannya dengan perbankan yang mungkin sudah tidak memungkinkan lagi untuk terus dilakukan pembiayaan dan lain sebagainya.

Jadi itu Pak, mungkin ke depannya bagaimana kita bisa dapat gambaran terkait dengan mungkin secara region itu bisa ada gambaran untuk masa-masa yang akan datang.

Saya kira demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (MUHAMMAD PRAKOSA):

Terima kasih.

Selanjutnya Bapak Andreas.

Sebentar kita kesepakatan kita dulu, inikan Magrib jam 17.50 WIB, jadi kita sepakati nanti kita selesaikan sebelum 18.10 WIB ya.

Silakan Bapak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Ketua Dewan Komisioner OJK beserta jajarannya.

Jadi pertama, saya ingin membahas mengenai kebijakan strategis daripada OJK tahun 2019, di mana poin pertama ini sangat penting mengenai alternative pembiayaan sektor strategis. Dan ini adalah bagian dari pendalaman pasar keuangan kita. Seperti kita ketahui bahwa untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang

direncanakan dan pada saat itu kita sudah bahas di dalam pembahasan kerangka makro ekonomi itu salah satu faktor yang juga dibahas itu adalah masalah pendalaman pasar keuangan kita. Dan ini memang sudah menjadi kebijakan strategis OJK di poin yang pertama. Namun, pendalaman pasar keuangan ini bukan hal yang mudah dan perlu kita lakukan secara serius karena kalau kita, saya mengutip Bapak Darmin Nasution yang tanggal 2 Januari 2019 membuka pembukaan di pasar modal pada saat itu dan saya kira Bapak Wimbo juga ada disitu. Bapak Darmin mengatakan kalau saya kutip “kita dari puluhan tahun selalu mengucapkan pendalaman pasar keuangan, tetapi tidak pernah cukup berhasil melakukannya”. Saya kira ini hal yang sangat kita mengucapkan puluhan tahun, ini Bapak Darmin sendiri yang ngomong di pembukaan pasar modal, tetapi kita tidak cukup berhasil melakukannya”.

Nah, karena itu sudah saatnya kan ini juga OJK mengatur, mengawasi dan melindungi. Bapak Darmin mengatakan ada PR besar, baik oleh pelaku jasa keuangan, oleh regulator maupun oleh Pemerintah. Karena itu, kami minta kajian atau masukan yang mandalam. Kalau ada kebijakan atau ada perundang-undangan atau apapun juga kan Presiden berkali-kali mengatakan ingin melakukan terobosan. Inilah sekarang saatnya kita melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau memang ada katakanlah perubahan kebijakan, revisi Undang-Undang, apa yang bisa dilakukan oleh kami. Ini sangat penting, karena kalau tidak ya kita akan mengulangi lagi tahun depan, kita bicara pendalaman pasar keuangan tetapi pernyataan Bapak Darmin akan terulang lagi, kita tidak cukup berhasil untuk melakukannya, ini sudah puluhan tahun.

Nah, dalam hal ini kami ingin betul-betul bahwa kebijakan yang pertama ini betul-betul bisa kita eksekusi apa saja ini kendala, misalnya apa yang menyebabkan BUMN-BUMN kita terlalu lama atau katakanlah proses IPO-nya ini jadi begitu terhambat, inikan jadi hal-hal yang memang harus segera tuntaskan dari hulu sampai hilirnya.

Nah, berikutnya yang dikatakan disitu bahwa salah satu hal yang harus dijaga itu adalah integritas pasar modal dan disitu disebutkan oleh Bapak Darmin *first line of defense*-nya itu adalah *good governance*, *second line of defense*-nya itu adalah akuntan atau auditor dan *third line of defense* itu adalah regulator. Kalau kita lihat *first line of defense* masalah *good governance* ini sangat menarik, karena kita ingin sebetulnya bagaimana langkah-langkah untuk meyakinkan bahwa pelaku pasar modal atau pelaku di bursa betul-betul melaksanakan ini. Kita tahu bahwa sebetulnya apa yang terjadi dalam hal ini dengan kasus masalah PT. Bank Bukopin yang kemudian laporan keuangannya di-*restate* kemudian juga keterbukaan informasi dari Semen Indonesia.

Dan yang terakhir yang sekarang ini masih ramai adalah kasus mengenai PT. Garuda Indonesia dan disitu dibawa-bawa nama OJK. Nah, ini perlu *clear* ini karena kalau tidak bagaimana yang disebut dengan *first line of defense* saja, intinya menjaga kepercayaan salah satunya, integritas pasar modal. Dan kalau tidak salah itu akan dikeluarkan *statement* bersama atau penelitian bersama antara Kementerian Keuangan dan OJK. Nah, ini perlu karena saya waktu itu kirimkan kok di media mengatakan bahwa dengan di-*statement* Menteri BUMN mengatakan bahwa untuk laporan keuangan sudah istilahnya sudah dicek oleh OJK atau sudah katakanlah

disetujui oleh OJK. Nah, ini perlu disampaikan secara jelas karena ini menyangkut kredibilitas daripada otoritas.

Yang kedua, masalah *second line of defense*-nya ini akuntan. Sejauhmana tindakan terhadap akuntan yang jelas-jelas melakukan ini. Kita perlu ini walaupun pembinaan akuntan ada di Kementerian Keuangan. Tetapi apakah kalau dia melakukan ini kemudian selalu dikatakan bahwa akuntan ini harus bagian dari *the big five*. Tanggungjawabnya *principle*-nya bagaimana. Karena dengan demikian ini, ini hal yang sangat menarik, makanya ini perlu kita sampaikan supaya kita ini mau banyak membuat instrument-instrumen segala macam tapi kalau hal-hal yang sangat mendasar ini tidak kita perkuat ini nanti akan membuat fondasi yang tidak kuat. Jadi saya ingin sejauhmana ini akuntan yang melakukan pemeriksaan terhadap Bank Bukopin, akuntan yang melakukan pemeriksaan kemarin dengan asosiasi pembiayaan. Ini bagaimana ini yang perlu kita lakukan.

Terus yang kedua dalam hal ini masalah saya ingin juga mendapatkan *update*, 1 Januari 2020 itukan akan diterapkan PSAK yang baru 72, 73 and 75 kalau tidak salah. Sejauhmana persiapan dari pelaku bursa kita, karena ini dampaknya juga cukup besar di dalam internal sistemnya apalagi kalau mereka menggunakan IT, mereka harus melakukan penyesuaian-penyesuaian ini. Sejauhmana *enforcement* daripada bursa untuk ini. Dan di dalam untuk hal ini kita juga menyoroti masih sangat rendahnya literasi pasar modal dibandingkan dengan perbankan sangat rendah sekali. Jadi bagaimana mau mengembangkan katakanlah retail investor kalau investornya masih sangat rendah. Nanti bisa dijawab sampai sekarang ini literasinya masih berapa dan langkah-langkah strategis untuk ini.

Nah, untuk berikutnya di dalam point keempat yaitu mempersiapkan industry jasa keuangan dalam menghadapi revolusi industry 4.0. Saya banyak mendapatkan masukan dari pelaku industry bahwa tentunya salah satu yang menjadi primemover-nya itu adalah masalah payment system. Tapi mereka sekarang merasa "loh ko payment system ini seakan-akan yang mengatur hanya Bank Indonesia". Memang kalau kita lihat dari Undang-Undangnya, Bank Indonesia itu bertanggungjawab terhadap *payment system*. Tapi kan di dalam industrinya *payment system* itu juga menyangkut sektor termasuk operasionalnya. Dan inilah sebetulnya kita inginkan bagaimana dalam hal ini kerja sama atau katakanlah pemahaman secara bersama antara Bank Indonesia dengan OJK, karena disini ada sebetulnya banyak sekali irisan-irisan yang sangat berhubungan di dalam masalah pengaturannya.

Terus yang berikutnya di dalam kebijakan strategis itu mereformasi bisnis proses industry keuangan. Dalam hal ini saya ingin mendapatkan *update* sejauhmana implementasi dari pengawasan terintegrasi, karena disebutkan masalah penyederhanaan ijin dari integrasi. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah apalagi dengan sekarang pengembangan produk yang sangat kompleks ini tidak lepas dari masalah pengawasan integrase keuangan. Kalau kita lihat sebetulnya struktur industry keuang kita itu di dominasi oleh dalam tanda kutip beberapa *financial holding company*. Sejauhmana pemetaan yang telah dilakukan oleh OJK, sekarang ini kita berapa sih yang menurut OJK *financial holding company* yang masuk di dalam pengawasan integrasi.

Berikutnya untuk IKMB, kita kemarin dengan asosiasi *finance company* itu membahas salah satunya kasus SNP Finance. Di situ sebetulnya kita lihat ini salah satu bentuk daripada pengawasan terintegrasi tadi. Untuk menghindari supaya ini tidak terjadi lagi terutama yang jaminan itu dipakai berkali-kali telah diterapkan aset register system, tetapi ini belum menjadi keharusan. Nah, point saya adalah kalau kita sudah pernah mengalami kasus semacam ini dan ini juga mengakibatkan perbankan kemudian perbankan nasional itu dalam tanda kutib menjadi katakanlah takut memberikan pembiayaan kepada industry jasa keuangan akhirnya lari mereka mendapatkan pinjaman luar negeri, yang sekarang terjadi seperti *switching*-nya. Nah, kalau memang aset register ini merupakan salah satu solusi untuk kemudian ... **(rekaman terputus)** Kenapa itu tidak diharuskan. Nah, ini jadi adalah peraturan yang berdasarkan *lesel to be land, Lesel to be land* itu kemudian diterapkan. Inikan saya tanyakan kenapa? Karena belum di haruskan. Hal-hal seperti ini jadi kita ingin menekankan tugas utama OJK itu adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen. Tugas-tugas strategis yang lain boleh dilakukan tetapi tugas utamanya, mandat utamanya yang perlu diutamakan.

Yang terakhir ini mengenai Gedung. Kami sangat memahami sekali kebutuhan OJK tentang adanya Gedung yang representative untuk ini. Tapi mohon supaya jangan sampai pengambilan keputusan tidak didasari oleh landasan hukum yang kuat. Dan *roadmap*-nya, karena kita lihat *roadmap*-nya ini harusnya *roadmap*-nya dulu ditetapkan dengan baik. Dan apakah cukup hal-hal yang sangat penting ini hanya kemudian diatur dengan MoU dan PKS. Ini saya lihat dasar hukumnya sangat lemah. Ini kami hanya mengingatkan karena jangan sampai kejadian-kejadian sebelumnya itu akan terulang kembali.

Saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Sebelum kita akhiri pendalaman ada Ibu Indah masih mau menambahkan.

Silakan.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Wimboh serta Bapak dan Ibu sekalian.

Saya hanya sedikit menambahkan saja karena kawan-kawan yang sudah menyampaikan pendalaman terdahulu sudah cukup lengkap, tetap menggarisbawahi tentang peran dan tugas OJK yang strategis, mengatur, mengawasi, dan melindungi khususnya untuk konsumen. Maka kali ini meskipun tadi diawal Bapak Wimbo telah menyampaikan pemaparan yang membuat kami tenah bahwa dari hasil *assessment*

sektor jasa keuangan domestik bahwa kinerja pasar keuangan domestik terpantau cukup baik. Kemudian permodalan SJK juga dianggap cukup kuat dan perkembangan intermediasi perbankan nasional mencatatkan perkembangan yang positif dengan tingkat resiko yang terjaga.

Apa yang telah disampaikan tadi Pak, kami juga mengamati di dalam pada saat kami bertemu dengan industry di daerah masing-masing bahwa peran dan fungsi OJK ini masih ada yang saya melihat masih ada gap pemerataan atau ada kesenjangan pemerataan untuk tingkat literasi dan inklusinya. Jadi kalau tadi mungkin saat ini sudah tercapai berapa, targetnya kan 35% untuk literasi dan 75% untuk inklusi. Nah, saat ini sudah tercapai berapa dan kemudian selain sasaran strategis yang telah dipaparkan tadi saya juga berharap salah satu peranan yang sangat penting adalah OJK ini mampu berperan terhadap dunia perbankan dengan menjaga net interest margin-nya. Kami mengamati bahwa net interest margin perbankan nasional masih cukup tebal, yaitu 4 lebih. Sementara mungkin ada negara-negara tetangga lain yang bisa lebih kecil 2%. Satu lagi adalah tingkat inefisiensi perbankan itu sendiri.

Nah, itu saya pikir pengawasan dan juga termasuk perlindungan terhadap konsumen lebih ditingkatkan lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Elvi tadi ada beberapa kelompok masyarakat yang bahkan di Surabaya pun pada saat kami masuk ke kampus itu masih ada beberapa mahasiswa yang bahkan belum mengetahui dengan benar keberadaan daripada OJK, padahal sudah berjalan usianya sudah 8 tahu. Jadi saya pikir mungkin harus lebih massif lagi melakukan sosialisasi dan edukasi.

Mungkin saya pikir itu saja tambahan dari saya Pimpinan, bahwa OJK harus lebih memperhatikan perbankan nasional untuk lebih efisien dan kemudian net interest margin juga dipersempit dan mengawasi persaingan yang tidak sehat diantara perbankan nasional itu sendiri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira sudah.
Ibu Tuti masih?

F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):

Iya, sedikit ini Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.

F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E., M.M., M.Kes.):

Terima kasih Pimpinan atas waktunya.

Mungkin saya masih tetap mendalami masalah 5 kebijakan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019. Saya menggarisbawahi yang point 3, yaitu akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal. Disini ada programnya percepatan pembentukan 100 Bungdes yang bekerja sama dengan PUPR, tentu ini program yang sangat bagus sekali untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan sampai ke tingkat desa. Yang ingin saya tanyakan apakah OJK masih ikut sebagai pengawas atau pendamping, karena kebijakan-kebijakan masing-masing desa itu beda-beda Pak, saya hanya memberikan informasi saja Pak. Mungkin nanti Bapak bisa membuat suatu kebijakan untuk di daerah bahwa di daerah itu di desanya pun ada pengelolaan Bungdes yang sangat bagus, tetapi kenapa beberapa desa itu selalu study bandingnya keluar. Jadi kami inginkan tentu pengelolaan Bungdes ini agar betul-betul secara professional, efisien dan efektif. Jadi pengelolaan ini benar-benar jangan sampai nanti terjadi seperti di Bali itu ada LPD Pak, LPD-nya juga mohon maaf ada kurang bagus pengelolaannya jangan sampai Bungdes pun demikian Pak. Kadang-kadang dana desa itu juga sering dipakai untuk kebijakan yang tidak produktif, misalnya seperti di pakai untuk membeli mobil, padahal mobil itu mobil yang golongan mewah seperti expander. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini agar bisa ikut diawasi.

Kemudian yang point 4, yaitu OJK mendorong inovasi industry keuangan untuk menghadapi dan manfaat daripada revolusi industry 4.0. Masalah fintech p to p landing Pak, saya paham betul bahwa OJK sudah sangat maksimal sekali mengawasi ini, sehingga sudah banyak fintech p to p landing ini yang ditutup Pak. Kemudian usaha apa lagi yang akan dilakukan oleh OJK mengenai edukasi kepada masyarakat bahwa selalu korbannya ini adalah masyarakat kecil. Jadi mungkin itu yang saya tanyakan.

Terima kasih.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Pimpinan, mohon ijin Pimpinan, tadi ada yang tertinggal satu yang ingin saya sampaikan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Satu lagi yang saya amati bahwa sepertinya OJK ini agak sedikit terlalu mikro Pak, seperti misalnya program Simpel dan Simuda ini. Apakah tidak semakin merepotkan OJK kalau meng-*create* program dan kemudian itukan yang menjalankan program tentu saja perbankan. Seperti ini Simuda, ada Simuda investasi, Simuda Emas, Simuda Rumah dan lain sebagainya sementara bank-bank itu sendiri itu juga memiliki produk-produk tabungan masing-masing.

Itu saja tambahan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira sudah semua ya.

Kita sesuai, Pak Andreas sudah kan, Bapak Hatari mau bicara?

Silakan.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Minta maaf terlambat baru selesai Rapat Banggar dan saya merasa perlu sekali datang kemari walaupun terlambat. Yang pertama, Bapak Wimbo yang terhormat. Minta maaf saya hanya mengulangi kembali mengingatkan kepada OJK terkait dengan begitu banyak pengaduan pada waktu kita Rapat Dengar Pendapat, FGD terakhir saya sudah menyampaikan dan ternyata sampai dengan saat ini semakin banyak terjadi resiko sosial bagi pasien BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sekarang ini banyak mengalami resiko sosial, apa resiko sosial? Pengobatannya belum sembuh harus diusir oleh rumah sakit. Tidak diperkenankan lagi berada di kamar itu harus keluar dan dengan cara paksa. Kenapa ini terjadi? Platform mereka sudah tidak cukup lagi. Ini keluhan semakin luar biasa, kami berharap OJK cepat bertindak Pak, bahkan keluhan lagi kalau minta resep datang ke BPJS Kesehatan tapi begitu *checkup* pergi ke Penang atau Malaysia atau Singapura, konyol ini.

Defisit pertama 5,7 triliun Pemerintah tidak sanggup menyuntik sebanyak itu. Beberapa waktu terakhir ini defisit menjadi hampir 10 triliun, disampikan oleh Menteri Keuangan. Jadi Pak, kalau defisit ini tidak ditutup maka sangat mungkin setiap hari defisit daripada BPJS Kesehatan naik terus. Kalau OJK tidak ada masalah ya, tapi kalau ini defisit terus menerus bisa-bisa DPR RI tidak bisa terima penghasilan lagi, APBN semua tersedot kepada pasien BPJS Kesehatan. Jadi ini hanya mengingatkan kembali Bapak, supaya menjadi perhatian.

Yang berikutnya, kebetulan kemarin itu Komisi ini melakukan Rapat Kerja dengan Bank Tabungan Negara. Dari berbagai presentase mereka dan *paper* yang kami baca Pak, terlalu banyak permasalahan dari Bank Tabungan Negara ini. Banyak sekali temuannya sehingga satu per satu kita melihat dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, kita sangat sekali sulit mengukur *spending*-nya. Dan temuan sebanyak itu Pak, tindaklanjutnya masih sekian persen on progress, on progress. Dan kemarin Pak, mereka secara jelas mengakui hal itu Pak, Bank Tabungan Negara ini. Jadi kita tanya Pak, tindaklanjutnya bagaimana. Bapak bayangkan ini tahun 2019 posisi pada bulan Maret kemarin Pak, menurut mereka temuannya sudah hampir 40 baru 3 bulan Pak, temuannya sudah 40 ditindaklanjuti 17 itu untuk tahun 2019, tetapi sejak tahun 2013 itu kemarin yang kami jumpai di Bank Tabungan Negara.

Yang berikutnya Pak, ini apresiasi mudah-mudahan hari ulang tahun yang keberapa ini ada tercatat disini OJK sudah punya kantor. Hanya saya ingatkan kepada Bapak Wimbo, Ibu dan semua di Maluku Utara belum ada kantor OJK. Mudah-

mudahan saya bisa carikan kantor OJK yang paling bagus di Maluku Utara sehingga tidak lagi bergabung dengan Sulawesi Utara, *insya Allah*.

Yang terakhir dari saya Pak, tertarik dengan ada perkembangan ekonomi global bahwa sebagai bangsa satu pun diantara kita tidak mengira bahwa perang dagang yang semakin memanas ini Pak, kapan berakhir ini *Allahu Alam*, sebab kita tidak tahu. Ini sudah bukan lagi biasa-biasa tapi sudah kategorinya memanas dan ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita Pak. Jadi perang tarif sudah terus memanas, harga BBM meningkat, tadi dari Bapak Mantan Walikota Sulawesi Tenggara sementara lagi jadi Senator Pak, supaya Bapak Wimbo dengan jajaran tahu ini Senator I disini dan ini Senator I lagi ada 3 Anggota Komisi XI DPR RI akan menjadi Senator dalam 3 bulan kedepan. Ibu Evi yang duduk disitu Senator I dari Jambi, Senator I dari Sulawesi Tenggara.

Dalam hubungan itu tadi harga BBM tentunya meningkat, Kurs Dolar juga meningkat. Mudah-mudahan saja Pak, mudah-mudahan OJK dengan segala strateginya bisa meningkatkan kredit perbankan, bisa diatas 12% dengan kondisi seperti ini, kalau itu terjadi spektakuler apresiasi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terakhir itu ya.

Jadi kita sepakat tadi tutup sebelum Magrib, Bapak Wimbo kami minta dijawab secara komprehensif, tertulis kepada kami, nanti kita sambung lagi. Tapi untuk ini Bapak bisa menjawab secara general jawaban yang tadi terkait semuanya, nanti tertulisnya tetap kami mintakan.

Sebelum Bapak menjawab saya ingin menambahkan Pak, bahwa KUR ini 120 triliun 1 tahun, belum subsidi bunganya hampir 10 triliun. Sementara Menristek itu anggarannya hanya 300 miliar, Menteri itu Pak, kalau sekarang ditambah Dikti lebih besar lagi. Kenapa tidak kita pikirkan ada lembaga khusus menangani KUR ini, karena target 40 juta penerima nasabahnya sampai hari ini tidak jelas. Kita pernah rapat berkali-kali dengan hal tersebut akan tetapi nasabah yang diterima pun tidak jelas. Kalau bicara tim sukses kami di lapangan ini mungkin satu kecamatan ada 10 orang, rata-rata punya 100 kecamatan sudah 1000 orang, kalau kita tanya KUR dia ditolak semua. Artinya kita perlu satu kejelasan juga mengenai KUR ini dan OJK saya kira punya kekuatan untuk bicara itu di kabinet.

Yang kedua, fintech Pak, saya agak kaget membaca perkembangan facebook. Semua orang tahu dengan US Dolar tetapi yang memegang duit US Dolar tidak lebih dari semiliar orang, tapi facebook itu *member*-nya 2 miliar orang. Dia akan menciptakan sistem keuangan baru, kita harus siap juga dengan hal tersebut.

Saya kira dua hal ini Pak, yang perlu kita sikapi kedepan.

Silakan Bapak Wimbo kami berikan kesempatan untuk menjawab secara general.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBO):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak dan Ibu sekalian.

Kami mencatat ada beberapa point yang sangat bagus, tentunya ini nanti akan kami tindaklanjuti dan akan kami jawab secara lebih detail secara tertulis. Sekali lagi terima kasih atas arahan-arahnya dan komentar-komentarnya. Kami hanya sedikit memberikan jawaban secara umum, jadi mengenai tadi ada pertanyaan pertumbuhan ekonomi, bagaimana strategi OJK bisa mendorong melalui pembiayaan dan bagaimana fokus 2019 kami kemarin sudah di rapat RAPB sudah kami sampaikan, kita akan strategi prioritas sectoral akan kita dorong ya. Dan bersama-sama dengan kementerian yang lain memberikan kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan seperti pariwisata, mengenai perikanan, smelter. Itu semua akan kita lihat dan inilah yang sebenarnya harus lebih detail lagi. Nanti perbankan tentunya akan mudah, maupun pasar modal dalam menentukan target, sektor mana dan kira-kira proyek mana yang bisa dan juga sekaligus nanti ini akan mempercepat di financial sektor.

Dan juga mengenai fintech kami sampaikan bahwa ini sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Dan fintech ini bukan hanya oleh domestik tetapi di internet ini dari internasional juga bisa langsung masuk. Dan ini kita harapkan masyarakat tentunya paham dan edukasi betul, tadi menyangkut edukasi supaya lebih massif dan lebih agresif ke daerah-daerah agar paham masyarakat tentang fintech ini. Masyarakat jangan sampai terpancing dengan tawaran-tawaran, sehingga satu orang bisa pinjam dalam semalam 20 kali. Dan ini juga agar masyarakat paham sehingga ini adalah banyak yang memanfaatkan untuk itu secara tidak bertanggungjawab. Sehingga literasi edukasi betul kami mendukung untuk hal ini.

Dan juga mengenai bagaimana perlindungan ini menjadi prioritas kami dan akan terus tingkatkan agar masyarakat merasa paham dan akhirnya paling tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Untuk itu, kami juga senantiasa menjaga agar stabilitas tetap terjaga, terjamin sehingga tentunya tadi program-program yang kami sampaikan tadi bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti masyarakat juga mendapatkan benefit kehadiran sektor jasa keuangan.

Bapak dan Ibu sekalian.

Ini barangkali juga waktunya sudah sangat mepet tetapi kami akan jawab secara tertulis. Dan tadi masalah BPJS Bapak Hatari terima kasih ya, dan masalah BTN kami sudah *noted*, sudah ada program kerja yang kita minta kepada BTN untuk segera itu dilakukan. Dan mengenai *finance company* memang sekarang perbankan lebih ketat memberikan pinjaman kepada *finance company*, karena beberapa kasus tadi seperti Sun Prima ini terbelalak bahwa perbankan harus lebih hati-hati, karena yang ternyata memang perbankan yang banyak dirugikan dengan adanya beberapa kasus. Dan juga

enforcement kepada akuntan publik terus kita lakukan, kemarin ada Sun Prima, ada semuanya ini nanti tentunya. Mengenai Garuda sebentar lagi akan diumumkan dan tentunya kita akan tetap professional.

Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan secara umum. Dan terima kasih atas arahnya dan tentunya nanti jawaban tertulis akan kami sampaikan.

Terima kasih, demikian Pak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih atas jawaban secara general.

Kita sampai pada ujung acara, yaitu pembacaan kesimpulan dari hasil rapat kita.

Bisa ditayangkan?

Kita bacakan ya.

1. Komisi XI DPR RI telah menerima laporan triwulan I tahun 2019 dari OJK.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBO):

Bapak Ketua, mohon izin saya untuk sholat tapi Ibu Waka akan ada disini.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

1. Komisi XI DPR RI telah menerima laporan triwulan I tahun 2019 dari OJK. Komisi XI DPR RI mendukung beberapa inisiatif yang dilakukan OJK, antara lain:
 - a. Peraturan terkait ketentuan uang muka 0% khususnya pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, roda empat atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi dan multiguna.
 - b. Aplikasi OJK Box untuk pemenuhan kebutuhan data pengawas yang efisien.
 - c. Kajian mengenai pengaturan stock split dan reserve stock split oleh perusahaan terbuka di pasar modal Indonesia.
 - d. Inovasi keuangan digital.
 - e. Persiapan pelaksanaan Mutual Evaluation Review atau MER dan Financial Action Tax Force atau FATF 2019-2020.

Apakah ini dapat disetujui?

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Kendaraan roda tiga contohnya apa?

KETUA RAPAT:

Sekarang ada bemo dan bajaj pakai gas Pak.

F-P. NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Roda dua, roda empat, roda tiga, roda tiga ini kita gagal paham ini.

KETUA RAPAT;

Roda tiga itu bemo dan bajaj, sekarang keluar model baru pakai gas. Dan banyak sekali truk-truk sampah itu berubah menjadi roda tiga sehingga dipungut juga kebijakannya.

Saya kira ini biasa saja ya, atau mau diperbaiki, ada komentar?

Silakan Ibu Nurhaida.

OTORITAS JASA KEUANGAN (NURHAIDA):

Baik, mohon ijin Bapak Pimpinan.

Kami pada prinsipnya setuju Pimpinan, walaupun sebenarnya butir C tidak sempat kita bahas secara diskusi di pertemuan ini, di rapat ini akan tetapi memang di paper kami ada. Jadi kalau itu berupa kajian mengenai pengaturan stock split dan reverse stock split tentu akan kami lakukan.

KETUA RAPAT:

Bisa ini ya?

OTORITAS JASA KEUANGAN (NURHAIDA):

Bisa.

KETUA RAPAT:

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi XI DPR RI meminta kepada OJK untuk menyampaikan jawaban tertulis secara lengkap atas pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI.

Jawaban ini kalau bisa di sampaikan sebelum kita reses ya, minggu depan ya, satu minggu setelah Rapat Kerja ini ya, maksimal 7 hari kalender.

Silakan Ibu Nurhaida.

OTORITAS JASA KEUANGAN (NURHAIDA):

Bapak Pimpinan, untuk point dua kami setuju 7 hari kalender. Mohon ijin untuk sedikit meralat yang butir 1e, itu persiapan pelaksanaan Mutual Evaluation Review atau MER, bukan “dan” tetapi disitu oleh Financial Action Tax Force atau FATF 2019-2020.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi kita rubah menjadi point 1 huruf e. “Persiapan pelaksanaan Mutual Evaluation Review atau MER oleh Financial Action Tax Force atau FATF 2019-2020”.

Baik, kita ketok kembali.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, untuk point 2 pun kita setuju ya?

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian kita telah selesai pada acara sesi terakhir, yaitu pengambilan kesimpulan dan keputusan.

Bapak dan Ibu hadirin semuanya.

Sebelum kita akhiri seperti biasa kami silakan untuk OJK untuk memberikan *closing statement*-nya.

Silakan.

OTORITAS JASA KEUANGAN (NURHAIDA):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang kami hormati.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil capaian triwulan I 2019 dari OJK. Dan kami juga sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi XI DPR RI terhadap program-program kerja yang kami rencanakan dilakukan di 2019. Mudah-mudahan evaluasi triwulanan ini bisa menjadi semangat dan mendukung bagi OJK untuk bisa melaksanakan tugas kedepan secara lebih baik lagi.

Terima kasih.

Saya kembalikan kepada Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bapak Wimbo.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBO):

Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat.

Pimpinan dan para Anggota Komisi XI DPR RI yang terhormat.

Kami akan tindaklanjuti tadi beberapa kesepakatan dan tentunya apabila ada hal-hal yang tentunya kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan tentunya kami berbagai saran tadi tentunya bermanfaat bagi OJK.

Dan sekali lagi terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, kami mengucapkan terima kasih kembali atas nama Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi XI DPR RI atas kerja samanya. Dengan demikian, acara kita akhiri dengan mengucapkan *alhamdulillah*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.55 WIB)

Jakarta, 27 Juni 2019

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**

